

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi di Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

Restu Nanda Syah Putra



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi di Kabupaten Pesawaran)

Oleh

RESTU NANDA SYAH PUTRA

Mencapai kemenangan pada saat kontestasi pemilu legislatif tentu tidak mudah, sehingga tiap kontestan harus memiliki konsep dan strategi yang dianggap efektif dan dapat mengungguli lawan politik lainnya. Kursi DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019-2024 berjumlah 45 orang. 15% diduduki oleh para kontestan petahana tiga periode, dari 45 kursi yang ada sebanyak 7 Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran merupakan petahana yang berhasil memenangkan kembali pemilihan dan 38 lainnya merupakan pendatang baru juga petahana dua periode yang berhasil mempertahankan kedudukannya di kursi DPRD periode 2019-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki oleh kandidat petahana tiga periode dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dalam politik tentu persoalan diatas adalah persoalan yang bisa terjadi di dalam politik sebagai salah satu bentuk dan wujud politik yang nyata. dalam teori modal sosial yang dijelaskan oleh Robert D Putnam, bahwa modal sosial bagian dari kehidupan sosial berupa jaringan, kepercayaan dan norma yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu tinggi akan memberi dampak positif pada tatanan sistem pemerintahan karena tingginya partisipasi masyarakat sipil yang membuat pemerintahan semakin akuntabilitas. Sehingga dengan memanfaatkan modal sosial maka seseorang akan mampu memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana Modal social anggota DPRD dalam memenangkan kontestasi pemilu legislative, Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan di teliti, Pengaruh Modal Sosial Terhadap Anggota DPRD Terpilih Tiga Periode Kabupaten Pesawaran, sumber data primer dan data sekunder, serta teknik purposive sampling yaitu penentuan informan sejumlah 5 informan. Analisis penelitian adalah analisi data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kata Kunci: Modal Sosial, anggota DPRD dan Pemilu Legislatif

ABSTRACT

SOCIAL CAPITAL ELECTED DPRD MEMBERS IN THREE PERIODS IN ELECTIONS LEGISLATIVE YEAR 2019 (Study in Pesawaran Regency)

By

RESTU NANDA SYAH PUTRA

Achieving victory in legislative election contests is certainly not easy, so each contestant must have a concept and strategy that is considered effective and can outperform other political opponents. The seats of the Pesawaran Regency DPRD for the 2019-2024 period total 45 people. 15% are occupied by three-term incumbent contestants, out of the 45 seats there are as many as 7 Members of the Pesawaran Regency DPRD who are incumbents who have won re-election and 38 others are newcomers who are also incumbents for two periods who have managed to maintain their position in DPRD seats for the 2019-2024 period. This research is to describe the social capital possessed by incumbent candidates for three periods in winning the 2019 legislative elections in Pesawaran Regency. In politics, of course the above issues are issues that can occur in politics as one of the real forms and forms of politics. in the theory of social capital explained by Robert D Putnam, that social capital is part of social life in the form of networks, beliefs and norms that encourage participants to act together more effectively to achieve common goals. Besides that, high levels will have a positive impact on the governance system because the high participation of civil society makes government more accountable. So that by utilizing social capital, someone will be able to win political contestation. This research uses qualitative research methods, the object of research is the focus of the problem that will be examined. purposive sampling, namely determining the number of 5 informants. The research analysis is an inductive qualitative data analysis, namely an analysis based on the data obtained, according to Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analysis consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification.

Keywords: Social Capital, DPRD members and Legislative Elections

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi di Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

Restu Nanda Syah Putra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH
TIGA PERIODE PADA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2019 (Studi di Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : Restu Nanda Syah Putra

No Pokok Mahasiswa : 1916021023

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba S.IP., M.IP
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P

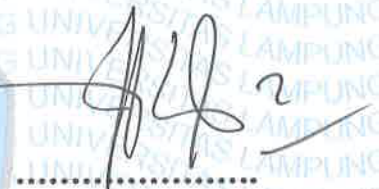
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba S.IP., M.IP.



Penguji : Bendi Juantara S.IP., MA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Restu Nanda Syah Putra
NPM. 1916021023

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Restu Nanda Syah Putra, tempat tanggal lahir Lampung, pada 19 Juli 2001 tepatnya di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Bapak Badrunnaim Syah, SE. dan Ibu Maidawati, S.Pd.I. Memiliki dua orang adik laki-laki bernama Zidan Arrizki Syah Putra dan Amar Azyan Syah Putra.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2006-2007 di TK Dharma Wanita Kedondong selanjutnya pada tahun 2007-2013 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Kedondong. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Pesawaran Tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Selama penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis, ditahun 2020-2021 penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Biro III Bidang Minat Bakat dan Kerohanian. Pada tahun selanjutnya di Tahun 2022 penulis kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2022 selama 150 hari

yang dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Putra Putri Daerah selama 40 hari. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sesuai dengan domisili masing-masing mahasiswa.

Karir di dunia kemahasiswaan penulis dilanjutkan di lembaga eksternal kampus. Pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (Basic Training) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada Tahun 2022 penulis diamanahkan menjadi Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) HMI Komisariat Sosial Politik Unila.

Pengalaman dunia kemahasiswaan penulis juga berlanjut diarah organisasi kepemudaan daerah, tahun 2021 penulis menjadi pengurus Karang Taruna Kabupaten Pesawaran sebagai anggota dalam Bidang Pemuda dan Olahraga, kemudian juga di tahun yang sama penulis tergabung dalam jajaran keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2019 hingga 2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.”

(QS. Huud: 114)

“Dan sungguh akan Kami berikan ujian atau cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.”

(QS. Al-Baqarah: 155)

“Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya (profesional).”

HR. Ahmad

“Berpikir besar kemudian bertindak.”

Tan Malaka

Jadilah Kaki yang Berjalan, Tangan yang Bergerak dan Kepala yang Berfikir.
Iman Ilmu Amal, Yakin Usaha Sampai.

“Semua akan Siap, bila ingin Menyiapkan, Semua akan Pantas, bila ingin Memantaskan.”

(Restu Nanda Syah Putra)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriringsalam, selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan Karya ilmiah sederhana ini teruntuk

Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi

Badrunnaim Syah, SE. dan Maidawati, S.Pd.I

Adik-adik Kebanggaan yang ku sayangi

Zidan Arrizki Syah Putra dan Amar Azyan Syah Putra

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Tiga Periode Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019" (Studi di Kabupaten Pesawaran). Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M Selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus Kanda di lamban juang Tondano 35.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya baik tentang perkuliahan maupun tentang organisasi. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing utama dan Abang Panutan saya di lamban juang Tondano 35. Terima kasih bang sudah menjadi orang yang sangat penting dan berarti didalam hidup saya, atas semua bantuan dan kerjasamanya baik selama dalam urusan perkuliahan untuk menyelesaikan persoalan tentang kemahasiswaan di bidang akademik dan organisasi maupun di luar kampus tentang pembelajaran seputaran perjuangan perjalanan hidup. Semoga abang Darma sehat selalu, semoga keinginan abang tercapai untuk menjadi orang yang hebat dan tetap menjadi abang yang bisa menuntun juga membimbing saya.
8. Bapak Bendi Juantara S.IP., MA Selaku dosen Penguji utama yang telah memberikan banyak masukan, saran, kritik, serta motivasi. Terima kasih bang sudah membimbing dan membina saya selama saya mengemban Amanah sebagai Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan, semua ilmu juga bimbingan abang akan selalu saya ingat dan lakukan untuk kehidupan kedepan.
9. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma,

Pak Robi, Pak Bendi, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini semoga bapak ibu sekalian selalu dalam lindungan-Nya.

10. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Puput. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Badrunnaim Syah, SE. dan Ibu Maidawati, S.Pd.I yang selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta mendukung saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan Skripsi. Alhamdulillah dan terima kasih. Bapak, Ibu sekarang abang sudah Sarjana dan berjuta-juta terima kasih pun tidak sanggup untuk membalaskan keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menjaga putramu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Tak pernah terlintas dan terfikir abang bisa menyelesaikan perkuliahan ini Pak, Bu. Tanpa semangat demi membahagiakan dan membuat Bapak juga Ibu Bangga mungkin abang bukanlah apa - apa. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu. Tak pantas rasanya ungkapan terimakasih kusampaikan disini biarlah do'a kusampaikan kepada Sang Pencipta, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi bapak dan ibu. Aamiin Allahummaa Aamiin.

13. Adikku Zidan Arrizki Syah Putra dan Amar Azyan Syah Putra. Terima kasih telah menjadi penyemangat abang dalam hidup ini terimakasih Dan, Ma sudah menjadi adik-adik yang sabar dengan tingkah, prilaku dan perbuatan abang selama ini. Semangat ya Dan, Ma. Semoga do'a kita untuk bisa menjadi orang-orang hebat dimasa mendatang terkabulkan. Abang minta maaf kalau belum bisa sepenuhnya menjadi abang yang memberikan contoh yang baik untuk kalian. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bapak, ibu dan membahagiakan mereka.
14. Selaku informan saya Anggota DPRD Tiga Periode Kabupaten Pesawaran Bapak Yusak, SH., MH. Fraksi Golkar, Bapak Mustika Bahrum SE., MM. Fraksi Golkar, Bapak Suprpto Fraksi PDI-P, Ibu Tati, SE. Fraksi PKS, dan Ibu Devita Sahara Fraksi PKB.
15. Teruntuk Keluarga Besar yang tercinta terimakasih telah ikut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk orang yang berpengaruh mulai awal sampai akhir masa-masa perkuliahan Febriana Yuresa. Terima kasih telah hadir menjadi bagian terpenting dalam hidup ini, kebersamai belajar untuk menjadi dewasa sampai saat ini, terima kasih sudah menjadi perempuan paling sabar nomor 2 dihidup ini, selalu menjadi penyemangat dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan untuk kita serta mewujudkan keinginan kita berdua.
17. Sepupu-sepupu yang saya banggakan dan sayangi, Uni Ria, Bang Wirahadi, Bang Darma, Kak Ame, Kak Ana, Bang Ido, Zaki, Bang Yayan, Kak Tita, Bang Ican, Muli, Atin Tegar, Kiki, Minak Alvin, Bang Reza, Bang Ilul, Anis, Esi, Fitra, Rahma, Putri, Shila, Farhan, Dika, Rakan, Defa, Fatih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT
18. Saudara-saudara Sukadana Oke. Aldi Darmawan, Yoga Irfanda Alam, Rizki Ramadhan, Dito Pratama Gunawan, Ayandra Muhammad Azra, Adi Pramana Dhafa, dan Gilang Giffari. Terima kasih telah menjadi bagian sedih dan indahnnya masa perkuliahan ini, telah menjadi abang, adik dan teman yang saling peduli selama ini, suka dan duka kita lewati bersama walaupun kenyataannya waktu yang menentukan kisahnya, Terima kasih selalu

memberikan masukan, saran, dan motivasi bagi saya untuk bisa segera menyelesaikan perkuliahan ini. Semangat ya untuk kalian semua cepet nyusul. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dalam setiap langkah kita.

19. Saudara-saudari seperjuangan Lamban Tondano 35. Rizki Ramadhan, Dito Pratama Gunawan, Ayandra Muhammad Azra, Aldi Darmawan, Adi Pramana Dhafa, Dimas Andrian, Farhan Nur Fikri, Rakha Kurniawan, Andika Purbakala, Ghozali, Dede, Roro Ayu Wulansari, Wenty Agustina, Dian Irma. Terima kasih telah memberikan warna didalam perjalanan dunia perkuliahan dan selama berproses di Tondano 35, semoga kita selalu diberikan semangat sampai waktunya usaha kita sampai. Aamiin
20. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Farhan Nur Fikri, Rizal Efendi, Yoga Irfanda Alam, Rizki Ramadhan, Aldi Darmawan, Dito Pratama Gunawan, Ayandra Muhammad Azra, Adi Pramana Dhafa, Dimas Andrian, Made Arta, Rakha Kurniawan, Andika Feriyanta, Candra Wahyudi, Dewaruc, Bagas Mulya, Taufiq Zidan, Ade Utama, Agun Arshi, Alkat Efendi, Agung, Andika Purbakala, Aqil Siradj, Arrofi, M. Rizki, Dede, Farel, Fatwa, Rizki, Febianto, Gilang Giffari, Lukman, Nando, Otto, Riwan, Sadewa, Nabil, Agnessya Noulis, Jessica Cahyani, Roro Ayu, Luthfia, Fasha, Salsa Alox, Ayu Vaulanda, Anita Febby, Oksa Prima, Deadora, Ike Nurafni, Intan Dwi Ratna, Widya Sirregar, Widia Nurmala, Rifka Anisa, Fhera, Alfilia, Adelia, Caca Rizki, Amalisyah, Nanda Sahda, Nanda Arini, Avon, Ridho, Afriza, Ayu Nurfita, Cindy Aulia, Ananda Meidina, Desy, Ema, Fitri, Erika, Gadis, Neha, Riska, Yolanda, Wenty, Oca, Irma, Devi, Sucia, Nabila. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan telah memberikan warna bagi penulis dalam dunia perkuliahan. Tetap semangat mengejar apa yang dicita-citakan agar bisa tercapai.
21. Keluarga Besar Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2020/2021. Bang Arben Irawan, S.IP (Ketum Karismatik), Mba Nurotul Azizah, S.IP. (Sekum baik), Widya Sattya Utama Sirregar (Asekum 1 galak), Agnessya Noulis Cahyani (Asekum 2 jutek), Mba Fitriana Syahwa S.IP. (Bendum cuek), Luthfia Quinsafara (Wabendum galak), Mba Ayu Nandini S.IP. (Kabir I

jutek), Bagas Mulya (Sekbir 1 sok asik), Bang Aldi Nadiantara, S.IP. (Kabir 2), Fasha Alifia Putri (Sekbir 2), Bang Kevin Sofian, S.IP. (Kabir 3 super baik), Bang Agung Yuda P, S.IP. (Kabir 4 Garing), Widia Nurmala (Sekbir 4 Pendiem). Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

22. Keluarga Besar Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2022. Agnessya Noulis Cahyani (Sekum baik), Roro Ayu Wulansari (Bendum Jutek), Andina Rahma (Wabendum Andelan), Wenty Agustina (Kabir 1 Jenius), Zacky Mauladin (Sekbir 1 Cerdas), Farhan Nur Fikri (Kabir 2 Playboy), Diska Amanda Hamidi (Sekbir 2 Karismatik), Ayandra Muhammad Azra (Kabir 3 Gacor), Alviesto Abiyyu Arandha (Sekbir 3 Pendiem), Cindy Aulia Kamal (Kabir 4 Cuan), Srimulya (Sekbir 4 Gesit), Erika Tri Wahyuni (Kabir 5 Andelan), M. Ramadhan Saputra (Sekbir 5 Gacor). Terimakasih kalian telah menjadi bagian pembelajaran dalam menjalankan Organisasi yang sangat luar biasa ini, Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
23. Keluarga Besar Biro III HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2020/2021. Abangku M. Kevin Sofian (Kabir 3 Terbaik). Terima kasih banyak saya ucapkan telah mampu kebersamai melewati masa periode yang banyak kisah, menjadi abang yang sabar, mendengarkan bagai teman, menjalankan segala sesuatu dengan penuh semangat, terima kasih pula kawan seperjuangan sudah berproses sejauh ini untuk Yoga Irfanda Alam, Rizki Ramadhan, Dito Pratama Gunawan, Ayandra Muhammad Azra, Ananda Meidina dan Fitri.
24. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 Husein, Iko, Rama, Raihan, Zacky, Diska, Sabiel, Efrildo, Panji, Ilham, Vito, Anas, Gilang, Tegas, Arya, Yulisa, Okta Dea, Novika, Regita, Reka, Aulia, Indaya, Andina, Meissy, Justitia, Sevtia, Jihan, Nunik dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
25. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 Wahyu Ramanda, Bisma, Dika, Nico, Rizki Harlian, Rizki Aditia, Ayub, Raihan, Asnan, Giffari, Rachel, Refina, Desta, Della, Ropelia, Vania, Ira, Sisy, Bela, Siti Nurhaliza, Sindy, Nabila, Dewi, Auzel dan yang tidak bisa saya sebutkan satu

per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semangat adik – adik, semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

26. Keluarga Besar Karang Taruna Kabupaten Pesawaran, Ketum Kanda Azmi, SE., Sekum Bang Mabrohul Alim, Bang Adam, Bang Kiki, Bang Fahrul, Bang Rahmat PO, Bang Mirza Anasya, Bang Roni, Bang Awan, Kak Meta, Kak Syafa, Kak Dila, Selfi dan saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas pembelajarannya sejauh ini, semoga sukses selalu untuk kita semua. Aamiin
27. Keluarga Besar Kader Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pesawaran, Kanda Reza, Alfian, Kanda Bangkit, Bang Rian, Bang Rifki, Wawan, Meta, Mirza, dan Kanda Yunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga waktunya kita untuk melanjutkan perjuangan segera tiba, sukses selalu untuk kita semua. Aamiin
28. Teman-teman KKN Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Andre, Shilvi, Ica, Yola, Dewi, Adilla. Semoga selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.
29. Masyarakat serta Aparatur Desa Sindang Garut, Pak Kades Kasio dan Aparatur Desa Mba Bella, Mba Maimunah dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses perkuliahan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.
30. Pegawai Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Pesawaran, Pak Aris, Mba Vera dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.
31. Kanda Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung. Bang Rahmando, Bang Arben, Bang, Muarif, Bang Kevin, Bang Fadhil, Bang Nendy, Bang Robby, Bang Rian, Bang Aldi, Bang Reynaldo, Bang Harjuno, Bang Tio, Bang Hayatami, Bang Alek, Bang Awan, Bang Bangkit, Bang Feby Satria, Bang Bari Arla, Bang Alif, Bang Aziz, Bang Aziz Gondrong, Bang Sofian, Bang Feby Salam, Bang Ade Feri,

Bang Hengky Warnando, Bang Hendra, Bang Wisnu, Bang Riyo, Mba Nurotul, Mba Ayu, Mba Shinta, Mba Purnama, Bang Vico, Bang Tiyas, Bang Anam, Bang Darji, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada setiap langkah kita. Aamiin.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam san wacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa pikiran. Yakin Usaha Sampai.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023
Penulis

Restu Nanda Syah Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Modal Sosial	12
2.2 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18
2.2.1 Peran DPRD.....	19
2.2.2 Fungsi DPRD.....	20
2.3 Pemilihan Umum	22
2.3.1 Pemilihan umum di Indonesia dan Tujuan.....	25
2.4 Kerangka Pikir	26
III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Jenis Data	30
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.1 Wawancara Mendalam.....	31
3.6.2 Observasi.....	32
3.6.3 Dokumentasi	32
3.7 Teknik Pengolahan Data	32
3.7.1 Editing	32
3.7.2 Interpretasi Data.....	33
3.8 Analisis Data	33
3.8.1 Reduksi Data	34
3.8.2 Penyajian Data	34
3.8.3 Menarik Kesimpulan.....	35

IV	GAMBARAN UMUM.....	35
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran	36
4.1.1	Sejarah Kabupaten Pesawaran	37
4.1.2	kondisi geografis kabupaten pesawaran.....	39
4.1.3	Latar Belakang Pemilu.....	42
4.1.4	Gambaran Umum DPRD Kabupaten Pesawaran.....	43
4.1.5	Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran	44
4.1.6	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.....	46
4.1.7	Gambaran Kehidupan Sosial Kabupaten Pesawaran.....	48
V	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1	Hasil Penelitian	52
5.1.1	Kepercayaan	54
5.1.2	Jaringan.....	59
5.1.3	Norma.....	62
5.2	Pembahasan.....	66
5.2.1	Kepercayaan.....	66
5.2.2	Jaringan.....	69
5.2.3	Norma.....	73
VI	PENUTUP	80
6.1	Kesimpulan.....	80
6.2	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Pesawaran.....	4
2. Daftar Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran	7
3. Nama – nama Informan.....	31
4. Jumlah Kecamatan Kabupaten Pesawaran.....	40
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019 - 2024.....	46
6. Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran.....	46
7. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran.....	47
8. Jumlah Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran.....	52
9. Aspek Kepercayaan.....	75
10. Aspek Jaringan.....	79
11. Aspek Norma.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Calon Tetap DPRD Kab. Pesawaran	5
2. Kerangka Pikir	27
3. Apek Kepercayaan	75
4. Aspek Jaringan	79
5. Aspek Norma	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gejolak kontestasi politik sudah mandarah daging dalam pelaksanaan Demokrasi di negara Indonesia, menjadi budaya pembangkit semangat seluruh masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada saat pemilihan umum. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari wujud pelaksanaan demokrasi. Negara yang sistem pemerintahannya berpanutan pada prinsip-prinsip demokrasi memerlukan adanya sebuah mekanisme pergantian pemimpin yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Terutama dalam pemilihan anggota legislatif, yang nantinya akan menjadi wakil dari rakyat untuk menyampaikan permasalahan apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditemukan solusi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem demokrasi, namun pembangunan demokrasi di Indonesia seperti banyak mengalami rintangan dan halangan. Demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan, maka proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Meningkatnya partisipasi (atau inklusifitas) berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakatnya dari partisipasi.

Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak kebebasan secara penuh. Kompetisi (atau liberalisasi) menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan, paling tidak bagi beberapa anggota sistem politik. Meningkatnya

liberalisasi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu negara maka akan lebih membuka peluang bagi berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim demokratis yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya

Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota legislatif di tahun 1999. Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan dengan adanya rasa tanggungjawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001).

Kekuasaan dalam pemerintahan terdapat pembagian dan fungsinya, secara horizontal menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*division of powers*). Menentukan siapa yang menduduki jabatan eksekutif, legislatif diperlukan suatu pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu proses dalam masyarakat secara langsung memilih calon kandidat baik partai politik maupun individu untuk menjadi perwakilan dalam lembaga eksekutif, dan legislatif. Pemilihan umum menjadi panggung politik dalam berdemokrasi. Para calon pemimpin bersaing untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.

Kompetisi dalam pemilihan umum tidak hanya dari antar calon, namun figur dari seorang calon juga sangat menentukan, seperti ketokohan dan popularitas dalam

masyarakat, moralitas, serta pekerjaan. Disini modal menjadi sangat penting, salah satunya yaitu modal sosial. Dalam disertasi yang berjudul *Perempuan Dalam Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah* (Lestari, 2019:315) menjelaskan bahwa kepemilikan modal perempuan sangat memberi kontribusi perjuangannya didalam arena kontestasi politik.

Hal ini berarti dengan mengingat budaya patriarki yang ada di Indonesia, kepemilikan modal sosial dapat digunakan sebagai salah satu modal dalam mengikuti kontestasi politik, baik kandidat laki-laki ataupun perempuan semua bisa menduduki jabatan. Kedudukan modal sosial dalam dunia politik memang sangat penting, karena seorang calon yang memiliki modal sosial tinggi berarti calon tersebut tidak hanya memiliki jaringan dimasyarakat yang baik dan kepercayaan, namun juga norma yang diterapkan memang baik, ketiganya dijadikan sebagai ujung tombak dalam mengikuti pemilihan umum.

Robert D. Putnam, mendefinisikan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (dalam Field, 2011: 51). modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Dengan mempunyai modal sosial yang tinggi, kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*) atau masyarakat. Akan tetapi melalui pengenalan-pengenalan yang sudah lama dibangun dan dirawat dengan masyarakat, para pemilih lebih leluasa untuk memilih karena sudah dapat menilai dan memahami kandidat yang akan dipilihnya, secara tidak langsung kandidat yang memiliki modal sosial yang kuat akan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mewakili masyarakat untuk menjadi pemimpin atau sebagai orang yang dipercaya menduduki parlemen ataupun pemerintahan.

Dalam pemerintahan maupun parlemen banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, tugas dan wewenangnya. Terutama DPRD, salah satunya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD itu sendiri dan adanya perubahan pola kerja anggota DPRD di pemerintahan daerah. Adanya perasaan

cepat puas atau karena faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat, ada kecenderungan integritas moral yang rendah sebagian anggota DPRD itu sendiri. sehingga DPRD mengalami krisis kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah tentunya banyak hal yang perlu di perjuangkan agar dapat bersuara dan memperjuangkan suara rakyat, nyatanya berbagai permasalahan tetap saja berlarut-larut dan tidak ada solusi dari pada peran dan fungsi DPRD dalam berjalanya pemerintahan di suatu daerah saat ini, banyak kebutuhan masyarakat yang bersifat urgent tidak bisa dituntaskan sehingga secara tidak langsung masyarakat semakin acuh dengan sendirinya karena rasa kekecewaan terhadap wakil rakyat yang telah dipilih oleh mereka.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.271/PL.01.3-Kpt/06KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, sebanyak 45 kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang terbagi di 5 wilayah daerah pemilihan

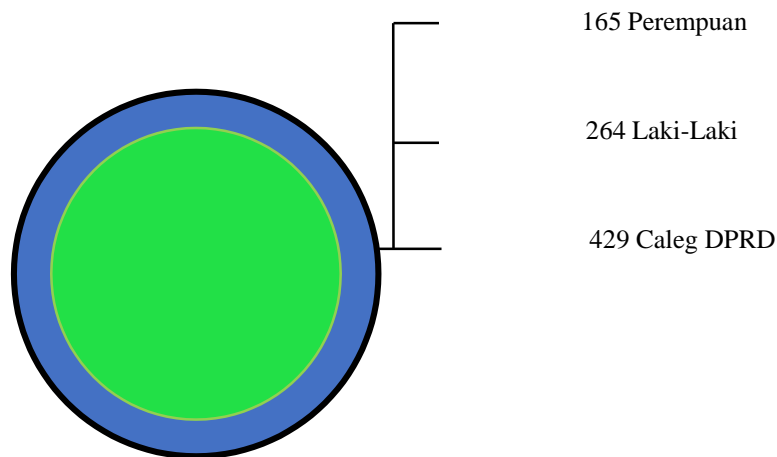
Tabel 1.1 Jumlah kursi DPRD Kabupaten Pesawaran

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
PESAWARAN 1	Gedongtataan	9
PESAWARAN 2	Negerikaton dan Tegineneng	11
PESAWARAN 3	Way Ratai, Teluk Pandan, Padang Cermin	10
PESAWARAN 4	Marga Punduh, Punduh Pidada	3
PESAWARAN 5	Kedondong, Way Lima, Way Khilau	12
TOTAL		45

Sumber : KPU Republik Indonesia Tahun 2018

Pada kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pesawaran periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melaksanakan penetapan calon anggota tetap pemilu legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019. Penetapan ini berdasarkan berita acara KPU No. 125/ PL.01.4-BA/1801/KPU-Kab/IX/2018 usai menggelar rapat pleno KPU Pesawaran yang digelar di Sekretariat KPU di Jl. Raden Intan, No. 82A, Gedong Tataan, Kamis (21/9/2018).

Gambar 1.1 Data Calon Tetap DPRD Kab. Pesawaran



Gambar 1.1 Data Calon Tetap DPRD Kab. Pesawaran

Sumber : KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2018

Dari jumlah calon sebanyak 429 tentunya para calon memiliki latar belakang dan memiliki modal yang berbeda-beda pula serta berasal dari partai yang berbeda-beda. Pada kontestasi pemilihan legislatif DPRD Kabupaten/Kota, para calon anggota DPRD baik itu petahana maupun pendatang baru tentunya saling berebut kepercayaan dan berebut hati masyarakat untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam mencapai kemenangan, tentunya hal ini masyarakat tidak semata-mata memilih tanpa penilaian baik bagi calon petahana maupun pendatang baru.

Dari jumlah 429 calon kandidat yang telah ditetapkan KPU pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran, terdapat calon kandidat petahana yang mencalonkan diri kembali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai legislatif pada pemilihan tahun 2019, tentu para calon petahana memiliki peluang

tambahan karena sudah melaksanakan kinerjanya selama 2 periode terakhir dan juga sudah dikenali oleh masyarakat khususnya dapil para petahana. Dari Jumlah 45 Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 sebanyak 5 anggota DPRD mencalonkan diri kembali dan terpilih untuk melanjutkan kinerja mereka dalam periode ke 3 sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari tahun 2019 - 2024.

Pada kontestasi politik banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat terpilih, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpilihnya calon legislatif adalah masyarakat lebih memandang figur dari caleg dibandingkan dengan partai politik caleg, kemudian bagaimana strategi caleg untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, faktor terpilihnya caleg yaitu dengan memiliki modal yang cukup kuat. Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga serta jaringan sosial yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan calon legislatif lainnya.

Setelah berlangsungnya kontestasi politik pemilihan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran pada 17 April 2019, KPUD Kabupaten Pesawaran menggelar rapat pleno penetapan hasil suara dan perolehan kursi anggota Legislatif Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan berita acara nomor : BA/024/PL.01.9-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pesawaran terpilih hasil Pemilu 2019.

Tabel 1.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Devita Sahara	PKB	Pesawaran 1	1.880
Zulkarnain	PKB	Pesawaran 2	1.470
Firdayana	PKB	Pesawaran 3	1.110
Rudi Andriansyah	PKB	Pesawaran 5	1.700
Rohimah Rahman, S.Ag.	PKB	Pesawaran 5	1.677
Evi Susina, S.H.	Gerindra	Pesawaran 1	1.542

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Lenida Putri, S.IP.	Gerindra	Pesawaran 2	2.142
Rudi Agus Sunandar, SE.	Gerindra	Pesawaran 3	1.211
H. Syaipurrohman, SE.	Gerindra	Pesawaran 5	1.564
Aria Guna, S.Sos.I., M.M.	PDI-P	Pesawaran 1	1.786
M. Nasir, S.I.Kom., M.M.	PDI-P	Pesawaran 2	6.196
Sucipto, S.A.P.	PDI-P	Pesawaran 2	2.778
Bambang D.S.L.P., S.H. S.Kep	PDI-P	Pesawaran 2	1.922
Suprpto	PDI-P	Pesawaran 3	2.440
Evi Dwiyana Lestari	PDI-P	Pesawaran 3	1.521
Masnayati	PDI-P	Pesawaran 4	1.787
Heri Yurizal Efendi	PDI-P	Pesawaran 5	1.612
Harno Irawan	PDI-P	Pesawaran 5	1.593
Drs. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I.	Golkar	Pesawaran 1	1.177
Yusak, SH., MH.	Golkar	Pesawaran 2	2.894
Bambang Suheri, SH.	Golkar	Pesawaran 3	2.278
Mustika Bahrum, SE., M.M.	Golkar	Pesawaran 5	2.277
Hamsinar	Nasdem	Pesawaran 1	1.549
A. Gunawan	Nasdem	Pesawaran 3	1.364
Fahmi Fahlevi, S.Pd.	Nasdem	Pesawaran 4	2.270
Roliyansyah, SE.	Nasdem	Pesawaran 5	894
Atut Widiarti, S.Sos.	PKS	Pesawaran 1	1.221
Tati, SE.	PKS	Pesawaran 2	2.250
Widada	PKS	Pesawaran 3	1.881
Agung Prasetia Baktiana	PKS	Pesawaran 5	2.187
Andi Supratman	PPP	Pesawaran 2	1.904

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Rifky Assofani, SH.	PPP	Pesawaran 5	1.372
Muklis	PAN	Pesawaran 1	2.417
Paisaludin	PAN	Pesawaran 2	4.666
Umroni, A.Md.	PAN	Pesawaran 3	898
Saifudin	PAN	Pesawaran 4	2.336
Saptoni, SH.	PAN	Pesawaran 5	2.841
Supriyadi	Hanura	Pesawaran 1	1.884
Rohman	Hanura	Pesawaran 5	1.037
Bumairo	Demokrat	Pesawaran 1	1.394
Olan Fitrionando	Demokrat	Pesawaran 2	5.179
Irfani, SP.	Demokrat	Pesawaran 2	2.398
Musannif Yasser Syamsurya	Demokrat	Pesawaran 3	1.646
Subhan Wijaya, S.Kom.	Demokrat	Pesawaran 5	1.795
Muzakkar, S.Sos	PBB	Pesawaran 3	1.998

Sumber : KPU Kab. Pesawaran

Dalam kontestasi pemilihan DPRD sebagai wakil rakyat, setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ia bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya. Dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan hak suaranya baik berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini terutama di daerah, pemilu legislatif patut mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan atau pemimpin yang berlegitimasi, tetapi juga karena pemilu itu sendiri secara substansial membawa pesan moral agar rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani.

Dalam kontestasi pemilihan tentu siapapun berhak menang dan kalah namun untuk mencapai kemenangan tentu ada hal yang mendukung itu semua terutama dalam

memilih wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas di daerah Kabupaten Pesawaran, salah satu teori mengemukakan bahwasannya seorang kandidat akan menang jika memiliki modal salah satunya modal sosial, dengan begitu bagaimana modal sosial para anggota DPRD terpilih dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk merencanakan penelitian tentang modal sosial anggota DPRD terpilih Kabupaten Pesawaran pada pemilihan legislatif tahun 2019 sebagai bahan referensi penelitian ini maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti : A. Mbolang, FB Tokan dan V. I A. Boro (2019), Judul : Modalitas Sosial Politik : Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM), Hasil dari penelitian ini lebih kepada kajian kombinasi modalitas dalam strategi pemenangan kandidat yakni modal politik, modal ekonomi dan pemanfaatan modal sosial secara maksimal untuk meraih kemenangan pada kontestasi politik, pada penelitian ini lebih menjabarkan bagaimana kandidat untuk dapat menang dengan strategi pemenangan dengan dominasi modal sosial yang dimiliki.
2. Peneliti : Ariel Kristianto Pura (2020), Judul : Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, Hasil dari penelitian ini berfokus terhadap strategi pemenangan calon anggota legislatif partai gerindra agar dapat terpilih dalam kontestasi di daerah kabupaten Halmahera barat.
3. Peneliti : Suci Indah Ratna Pratiwi (2020), Judul : Modal Sosial Anggota Legislatif Muda DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Pada penelitian ini lebih mendalami untuk mengetahui tahapan generasi muda dalam ranah kontestasi politik pemilihan anggota legislatif dengan modal sosial yang dimiliki yang mana hasil dari pada penelitian ini menjelaskan bahwa modal sosial yang dimiliki menjadi faktor penentu kemenangannya dalam pemilu.

4. Peneliti : Indria Sofiatul Hilmi (2020), Judul : Modal Sosial Siti Rochmah Yuni Astuti Dalam Pemilihan Legislatif 2019, Hasil penelitian ini fokusnya terhadap perjuangan dalam tahapan kontestasi legislatif seorang calon DPRD melalui strategi modal social agar dapat terpilih.
5. Peneliti : Renita Ananda dan Tengku Rika Valentina (2021), Judul : Modal Politik dan Modal Sosial Arthari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Sumatera Barat, Pada penelitian ini saya menilai penelitian ini lebih menjabarkan mobilisasi modal politik kandidat atau kelompok agar pemilih memilihnya dalam pemilihan dan fokus untuk menjelaskan mengenai aspek modal sosial dan modal politik oleh seorang aktor maupun kelompok dalam melakukan maketing politik agar mampu menciptakan strategi politik yang baik untuk memenangkan kontestasi politik.

Hal yang menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini ditekankan pada Analisa modal sosial para anggota terpilih DPRD Kabupaten Pesawaran selama 3 periode dalam masa jabatan 2019 – 2024 dan tindakan meminimalisir penggunaan biaya finansial yang berlebih, sehingga perilaku masyarakat akan lebih menjadi lebih terbuka. Bahwasanya wakil rakyat yang akan dipilih tidak perlu memiliki modal finansial yang besar agar tidak terjadi banyak kecurangan dan ketidak profesionalitas dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dapat dicegah dari hal kecil semaksimal mungkin. Karena sejatinya setiap kontestan yang berhasil duduk di kursi legislatif Kabupaten Pesawaran tentu memiliki strateginya masing masing, yang mana pada kontestasi politik pada saat ini sudah bukan hal biasa jika masyarakat banyak yang memilih jika seorang kandidat dapat memberikan bingkisan, uang ataupun bentuk imbalan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Tiga Periode di Kabupaten Pesawaran Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif tahun 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan “Untuk menganalisa modal sosial yang dilakukan Anggota DPRD terpilih tiga periode dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran”

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tambahan wawasan ilmu politik, khususnya melalui kajian pengaruh modalitas dalam kontestasi politik terutama Modal Sosial anggota terpilih DPRD Kabupaten Pesawaran yang berhasil menang pada pemilihan legislatif tahun 2019. Selain untuk pemanfaatan menggalang dukungan dalam kontestasi politik namun konsep modalitas juga berpengaruh terhadap kualitas daripada kandidat yang terpilih menjadi anggota DPRD.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat yang memiliki hak suara agar dapat melihat lebih dalam dan luas terhadap setiap kontestasi politik dan benar-benar memilih kandidat dengan tepat. Selain itu memberikan masukan untuk para kandidat yang maju dalam kontestasi pemilihan agar dapat efisien, efektif serta maksimal dalam membaca peluang dan kekuatan yang dimiliki melalui strategi yang sudah terencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial

Modal sosial merupakan salah satu unsur yang dapat dipandang sebagai basis dari dominasi dan legitimasi. Tidak dapat dipungkiri guna mewujudkan keinginan untuk masuk ke ranah politik membutuhkan modal sosial. Semakin besar modal sosial yang dimiliki, maka akan semakin mudah pula seseorang untuk memperoleh kekuasaan. Para calon kandidat legislatif baik itu laki-laki ataupun perempuan sangat membutuhkan modal sosial, perempuan harus memiliki modal sosial dominan karena porsi yang dibutuhkan oleh perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki. Dalam politik diyakini bahwa ranah politik merupakan dunia laki-laki untuk berkontestasi, sehingga perempuan yang terlibat didalam dunia politik membutuhkan modal sosial yang lebih besar untuk membuktikan bahwa perempuan bisa masuk di dunia politik yang dianggap sebagai dunia laki-laki. Perempuan yang memiliki basis massa besar dan tergabung dalam sebuah organisasi, biasanya mereka akan mendapat dukungan dari massa dan anggota organisasinya, karena mereka memiliki keinginan untuk menjadikan salah satu anggotanya menjadi anggota dewan yang nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi dan dalam masa yang telah mendukungnya (Lestari, 2019:234).

Modal sosial menurut Robert De Putnam terdapat tiga unsur dalam modal sosial yaitu Jaringan (*Network*), Kepercayaan (*Trust*), dan Norma (*Norms*). Modal sosial muncul akibat dari ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan kerja sama dan kebersamaan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Modal sosial pertama kali dikenalkan oleh seorang pendidik di Amerika Serikat pada abad ke-20 yang bernama Lyda Judson Hanifan, menurut Hanifan yang dikutip dalam Jurnal

Masyarakat dan Budaya (Syahra, 2003:2) menjelaskan bahwa modal sosial bukan merupakan modal dalam bentuk uang atau harta namun merupakan modal berharga untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Terdapat tiga tokoh utama yang banyak memberi kontribusi mengenai modal sosial namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada teori salah satu tokoh yaitu Robert De Putnam. Dalam buku Modal Sosial (Field, 2010:21) menjelaskan pandangan dari ketiga tokoh mengenai pengertian modal sosial. Pierre Bourdieu mengartikan modal sosial merupakan jumlah sumber daya dalam bentuk aktual maupun maya yang ada pada individu atau kelompok dan memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (Field, 2010:23). Sedangkan James Coleman memiliki pandangan mengenai modal sosial yang diidentifikasi berdasarkan atas fungsinya, ini bukanlah entitas tunggal, namun variasi dari entitas berlainan yang memiliki kesamaan karakteristik dimana mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan individu yang berada dalam struktur tersebut (Field, 2010:41). Yang terakhir menurut Robert D Putnam, modal sosial menurut Putnam yaitu bagian dari kehidupan sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan norma yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Field, 2010:51).

Dalam penelitian ini fokus pada pandangan modal sosial menurut salah satu tokoh yaitu Robert D Putnam. Menurut Putnam yang dikutip dalam jurnal dengan judul “Modal Sosial dan Pembangunan” (Haridison, 2013:31) menjelaskan bahwa modal sosial yang tinggi akan memberi dampak positif pada tatanan sistem pemerintahan karena tingginya partisipasi masyarakat sipil yang membuat pemerintahan semakin akuntabilitas. Tingginya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat akan memberi dampak yang baik bagi suatu negara, dimana akan terjalin hubungan antara masyarakat dan negara dengan baik yang mana akan terjaminnya stabilitas politik negara.

Menurut Putnam dalam bukunya yang berjudul *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (dalam Syahra, 2003:5) mendefinisikan modal sosial sebagai *feature of social organization, such as networks, norms, and trust, that*

facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit, ciri-ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.

Modal sosial menurut Putnam memiliki tiga aspek penting yaitu adanya jaringan/hubungan (*networks*), kepercayaan (*trust*), dan norma (*norms*), dimana ketiganya yang akan mendorong terjadinya sebuah kolaborasi sosial untuk mencapai kepentingan bersama, selain itu juga mengandung pengertian bahwa diperlukannya suatu jaringan sosial (*social networks*) yang ada dalam masyarakat, karena penggunaan jaringan/hubungan untuk kerja sama dapat membantu seseorang dalam memperbaiki kehidupan mereka (Fathy, 2019:3), serta norma yang mendorong produktivitas masyarakat. Putnam memandang bahwa modal sosial diperoleh dari individu terhadap sesuatu yang dimiliki kepada individu lain atau kelompok lain yang tidak memiliki untuk membuat suatu komitmen, dimana komitmen dianggap sebagai norma sosial yang menjadi komponen modal sosial seperti kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik, dan sebagainya. Norma sosial yang dimaksud adalah aturan tak tertulis yang berlaku dalam masyarakat guna mengatur perilaku dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Menurut Putnam yang dikutip oleh Haridison (2013:33) dalam artikel bahwa rasa saling percaya/kepercayaan (*trust*) merupakan hal penting yang ada dalam modal sosial. Saling percaya/kepercayaan (*trust*) muncul akibat dari adanya relasi-relasi sosial yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah penjabaran dari pokok konsep modal sosial menurut Putnam, yaitu:

- a. Hubungan/jaringan (*Networks*) Gagasan sentral dalam modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai, jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja satu sama lain, bekerja itu tidak hanya dilakukan dengan orang yang dikenalnya secara langsung, untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010:18). Melalui jaringan orang yang semula tidak tahu bisa menjadi tahu karena orang lain dapat saling memberi tahu, mengingatkan, menginformasikan, dan saling membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Jaringan sosial

merupakan struktur sosial yang dibentuk oleh individu atau kelompok atas dasar satu atau lebih persamaan seperti nilai, visi, misi, ide, teman, keturunan. Mengembangkan jaringan sosial yang didasarkan pada norma-norma bersama dan iklim kerja sama akan membuat modal sosial berkembang (Fathy, 2019:7-8). Konsep jaringan terdapat unsur kerja yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama, hubungan yang terjadi dapat dalam bentuk formal maupun informal. Hubungan sosial merupakan gambaran dari kerja sama serta koordinasi antar warga yang didalamnya telah tertanam ikatan sosial yang aktif. Melalui jaringan sosial, individu atau kelompok akan ikut serta dalam tindakan resiprositas dan melalui hubungan itu pula akan diperoleh keuntungan yang saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok.

Pada intinya, jaringan sosial dapat terbentuk apabila telah ada rasa saling percaya, saling tahu, saling memberi informasi, saling mengingatkan, serta saling membantu dalam mengatasi suatu permasalahan. Sebenarnya jaringan sosial memiliki arti yang sangat penting pada setiap individu atau kelompok, karena dapat dikatakan bahwa semua orang jaringan merupakan salah satu blok dari suatu bangunan.

b. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan sebuah ikatan tali yang memiliki arti sangat penting karena ia yang akan menyatukan. Inti dari kepercayaan yaitu adanya suatu hubungan antar dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat harapan yang apabila direalisasikan tidak akan memberi dampak buruk kepada salah satu pihak, dan apabila yang diuntungkan hanya salah satu pihak maka pihak lain tidak merasakan kerugian. Menurut Putnam, memandang kepercayaan/saling percaya (*trust*) merupakan salah satu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu yang diharapkan serta senantiasa akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, atau paling tidak pihak lain tidak akan bertindak yang dapat merugikan diri dan kelompoknya. Didalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Putnam menjelaskan

bahwa kepercayaan memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang memiliki rasa saling percaya dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu (Syahra, 2003:6).

Keberadaan kepercayaan yang terjalin dengan baik akan memudahkan individu atau kelompok dalam menjalin hubungan dan saling kerja sama yang menguntungkan, sehingga terdorong timbulnya hubungan timbal balik dari pihak-pihak yang terkait. Kepercayaan memiliki kedudukan penting bagi individu atau kelompok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, karena tanpa memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya akan terjadi disintegratif (Fathy, 2019:9)

Dimana dalam kelompok yang memiliki modal sosial yang tinggi akan mempermudah dalam penyelesaian masalah, hal ini karena adanya rasa percaya tinggi yang terjalin antar anggota atau masyarakat. Adanya kepercayaan (*trust*) yang dimiliki setiap individu atau kelompok akan memberikan dampak positif untuk perkembangan organisasinya atau perkembangan masyarakat itu sendiri.

c. Norma (*Norms*)

Menurut Robert M.Z. Lawang didalam buku Studi Masyarakat Indonesia (Handoyo, 2015:46) menjelaskan bahwa norma merupakan patokan perilaku dalam suatu kelompok, yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai orang lain, serta digunakan sebagai kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Dalam modal sosial, norma tidak dapat terpisah dari yang namanya jaringan dan kepercayaan. Apabila struktur jaringan muncul akibat dari adanya suatu pertukaran sosial yang terjadi antar dua orang atau lebih, maka sifat norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Dapat disimpulkan apabila didalam pertukaran sosial tersebut menimbulkan keuntungan dan

keuntungan itu hanya dirasakan oleh salah satu pihak maka pertukaran sosial selanjutnya tidak akan terjadi. Karena apabila dalam pertukaran yang pertama kedua pihak merasakan keuntungan yang sama, maka dalam pertukaran yang kedua terdapat harapan keuntungan yang lebih tinggi. Jika pertukaran sudah terjadi beberapa kali dengan prinsip saling menguntungkan yang dipegang teguh, oleh karena itu muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, dimana intinya guna membuat kedua pihak merasa diuntungkan melalui pertukaran yang terjadi.

Didalam Jurnal Antropologi menjelaskan bahwa norma mendasari kepercayaan sosial karena dapat menyebabkan harga transaksi menjadi lebih sedikit dan memfasilitasi kerja sama. Norma membutuhkan apa yang disebut dengan reaksi timbal balik (*reciprocity*). *Reciprocity* ada dua yaitu *reciprocity* seimbang yang menghadirkan pertukaran timbal balik yang seimbang antara pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan *reciprocity* umum adalah pertukaran yang berlangsung secara berkelanjutan yang artinya balasan dari kebaikan tidak harus langsung dibalas pada saat itu juga namun bisa dibalas dilain waktu (Putri, 2017:170).

Norma yang telah tercipta diharapkan akan selalu dipatuhi dan diikuti oleh individu ataupun kelompok. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat, norma ini biasanya mengandung sanksi sosial bagi yang melanggar serta dapat mencegah individu atau kelompok melakukan perbuatan menyimpang dari kebiasaan yang sudah berlaku didalam kehidupan masyarakat. Norma memang tidak tertulis namun dipahami oleh semua masyarakat serta melalui norma pula dapat digunakan untuk menentukan pola perilaku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

2.2 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah, yang

harapannya adalah sebagai pelaksanaan *check and balance* lembaga di luar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan. Kemudian, agar kepala daerah dapat membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPRD, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. Namun, perlu diingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian sinergi yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum atau pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Sebagai implementasi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD dibatasi, paling sedikit 35 orang sampai dengan 100 untuk DPRD Provinsi. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang. Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah berbeda-beda menurut kuota yang ditentukan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Perihal keanggotaan DPRD juga diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008). Parameter yang digunakan untuk menentukan berapa orang jumlah anggota DPRD untuk suatu daerah ialah jumlah penduduk di daerah bersangkutan. Keanggotaan DPRD disahkan atau diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Propinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap anggota DPRD memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dan

berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2.2.1 Peran DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan

pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);

2. *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

2.2.2 Fungsi DPRD

Dalam peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mewujudkan peran, terdapat juga fungsi-fungsi DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. *Representation*. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;
2. Advokasi Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi,

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- Fungsi legislasi
- Fungsi anggaran; dan
- Fungsi pengawasan

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

1. PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif. Dalam arti PERDA-PERDA yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.
2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (*output*) kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadahberhimpun anggota DPRD. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD tersebut. Apabila sebuah partai politik yang jumlah anggotanya sama atau lebih dari jumlah komisi, maka partai politik tersebut dapat membentuk satu fraksi. Namun, apabila sebuah partai tidak memiliki anggota sebanyak jumlah komisi di DPRD maka partai tersebut harus bergabung dengan fraksi lain atau bergabung dengan partai politik lain untuk membentuk sebuah fraksi. Sedangkan bila tidak satupun partai politik yang jumlah anggotanya memenuhi batas minimal pembentukan fraksi maka partai politik yang ada dapat membentuk fraksi gabungan, dengan catatan bahwa jumlah fraksi

gabungan di DPRD tersebut paling banyak 2 fraksi.

2.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, antara lain dikemukakan (Ibnu Tricahyo 2009:6) mendefinisikan secara universal pemilihan umum adalah: “*instrument* mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan kepala pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representatif democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Wakil-wakil yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (*general election*) secara berkala agar memperjuangkan aspirasi rakyat. Soedarsono (2005:1). Mengemukakan lebih lanjut pengertian pemilu yaitu: “bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, president untuk membentuk pemerintahan demokratis”. Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum.

Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benarbenar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melauai pemilihan umum. Menurut jimly Asshidiqqi (2006:169-171) penting penyelenggaran pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya :

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan Legislatif.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurjan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan

rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihannya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

2.3.1 Pemilihan umum di Indonesia dan Tujuan

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan,
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR, DPD. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;

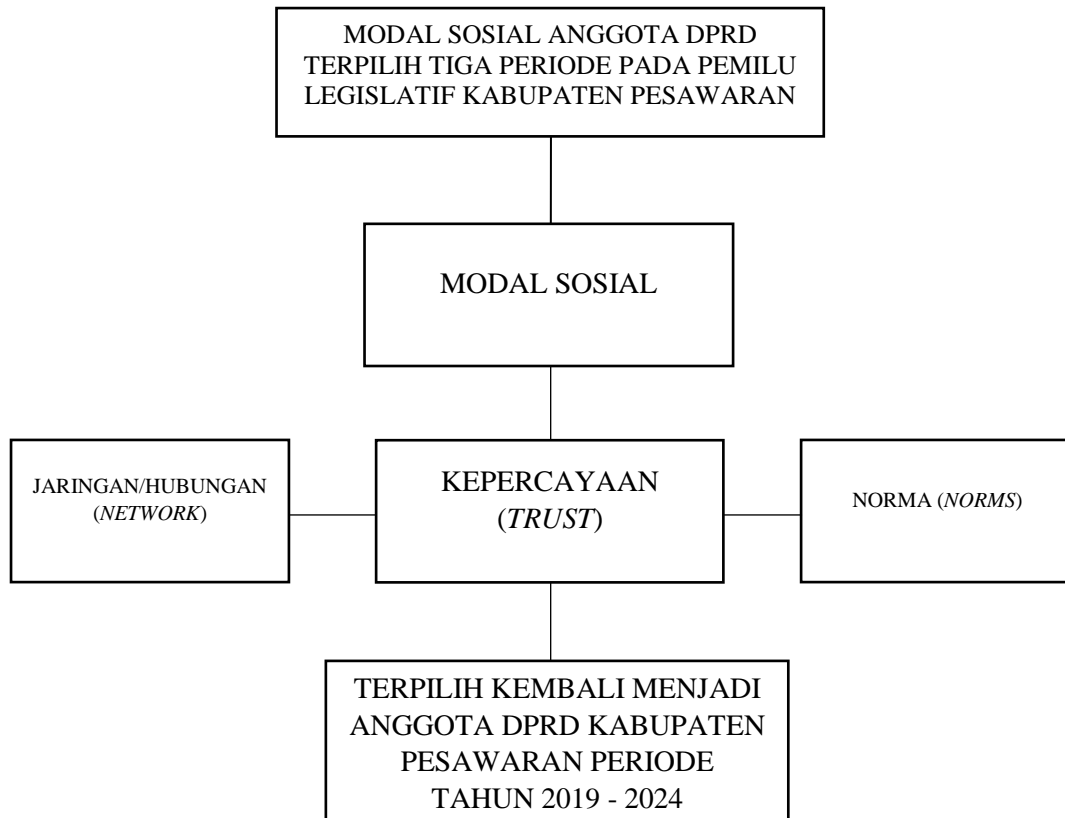
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan di atas peneliti ingin melihat adanya fenomena yang menarik pada pemilu legislatif tahun 2019 yang ada di Kabupaten Pesawaran, bahwasanya pada pemilihan kali ini terpilih kembali petahana yang 2 periode sebelumnya memang sudah menang dalam konstestasi pemilu legislatif di kabupaten pesawaran sehingga pada periode 2019 – 2024 terpilih menjadi 3 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

Modal sosial menurut Putnam memiliki tiga aspek penting yaitu adanya jaringan/hubungan (*networks*), kepercayaan (*trust*), dan norma (*norms*), dimana ketiganya yang akan mendorong terjadinya sebuah kolaborasi sosial untuk mencapai kepentingan bersama, selain itu juga mengandung pengertian bahwa diperlukannya suatu jaringan sosial (*social networks*) yang ada dalam masyarakat, karena penggunaan jaringan/hubungan untuk kerja sama dapat membantu seseorang dalam memperbaiki kehidupan mereka (Fathy, 2019:3).

Untuk mempermudah, berikut peneliti sajikan skema pemikiran dari penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. “Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2009:2).

Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). *Groat & Wang* (2013) Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah: (1) fokus pada satu atau beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata; (2) menjelaskan hubungan sebab akibat; (3) pengembangan teori dalam *fase desain* penelitian; (4) tergantung pada berbagai sumber bukti; dan (5) menggeneralisasikan teori.

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2014:5). “Penelitian kualitatif jugadidefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci” (Sugiarto, 2015:8)

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode

wawancara. Kedua, pengkajian mengenai pengaruh modal sosial ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena metode kualitatif lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*).

3.2 Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan diteliti Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keterpilihan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Yaitu berfokus bagaimana para kandidat yang berhasil duduk terhadap modal sosial yang mereka miliki dengan berbagai latarbelakang yang berbeda untuk mendapatkan suara pendukung terbanyak dalam pemilu di Pesawaran tahun 2019.

- a. Melihat jaringan sosial seperti apa yang digunakan untuk mencapai kemenangan serta apa saja yang dilakukan terhadap jaringan sosial yang dimiliki sehingga mendapatkan dukungan terhadap jaringan yang dimiliki.
- b. Melihat bagaimana setiap kandidat mendapatkan suatu kepercayaan dengan pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh kandidat di tengah masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu legislatif kabupaten pesawaran 2019 secara tiga periode beruntun.
- c. Melihat bagaimana kandidat membangun pola tingkah laku di tengah masyarakat yang menjadi nilai dukung penilaian masyarakat untuk mendukung seorang kandidat untuk menang sehingga terpilih kembali dalam pemilihan legislatif di kabupaten pesawaran 2019.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di Kabupaten Pesawaran yang sedang melaksanakan Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD tahun 2019. Selain itu peneliti akan melihat bagaimana masyarakat Pesawaran dalam mendukung kandidat yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Pesawaran.

3.4 Jenis Data

Penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara, yaitu: para kandidat yang berhasil memenangkan pemilu legislatif 2019 di kabupaten Pesawaran dan beberapa sampel masyarakat yang mendukung kandidat di dapil masing-masing kandidat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan yang telah peneliti tentukan untuk di wawancarai.

Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Fraksi/Masyarakat	Daerah Pemilihan
1.	Devita Sahara	PKB	Dapil 1
2.	Yusak, S.H., M.H	GOLKAR	Dapil 2
3.	Tati, SE.	PKS	Dapil 2
4.	Suprpto	PDI-P	Dapil 3
5.	Mustika Bahrum, SE., MM.	GOLKAR	Dapil 5

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2021

Alasan memilih informan berikut karena beberapa calon informan yang saya pilih merupakan anggota DPRD petahana yang berhasil terpilih kembali menjadi 3 periode di kursi DPRD Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Fraksi dan daerah pemilihan yang berbeda.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia, wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian- pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:72).

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur dan mendalam.

2. Observasi

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Teknik Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Pada observasi berperan ini yang dilakukan adalah dengan melihat langsung aktivitas, dalam penelitian ini melihat langsung data-data perolehan suara pada pemilu legislatif di Kabupaten Pesawaran tahun 2019.

3. Dokumentasi

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain. Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan

sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

2. Penyajian Data

Matthew B Miles & A. Michael Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3 Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Matthew B Miles dan A. Michael Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: Penarikan kesimpulan menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan- catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007.

Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung). Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran

(P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan.

Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. Alzier Dianis Thabranie diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak Muallim Taher sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001. Selanjutnya Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran.

Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian diserahkan terimakan dari Bapak Muallim Taher kepada Bapak Drs. Zainal Fanani Idris berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor : 01/Istimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/Istimewa/II/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran.

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain :

1. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di GedongTataan;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan;
6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan

Tabel. Jumlah Kecamatan Kabupaten Pesawaran

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Gedong Tataan	Gedung Tataan	97,06
2	Negeri Katon	Negeri Katon	152,69
3	Tegineneng	Trimulyo	151,26
4	Way Lima	Batu Raja	99,83
5	Padang Cermin	Padang Cermin	127,34
6	Punduh Pedada	Bawang	113,19
7	Kedondong	Pasar Baru	67,00

(Sumber : Portal Pesawaran)

Secara astronomis, Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 5,120 - 5,840 Lintang Selatan dan 104,920 – 105,340 Bujur Timur. Pesawaran memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264mm sampai dengan 2.868mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70km/hari atau 5,83km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C dan suhu rata-ratanya adalah 28,8°C.

4.1.1.1 Kondisi Demografis Kabupaten Pesawaran dan Latar Belakang Pemilu di Kabupaten Pesawaran

Pemilihan umum tetaplah merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Suatu proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dalam hal pemilihan semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan, maka dipakailah sebutan pemilihan umum, disingkat dengan pemilu (Donald Parulian 1997:4). Dengan demikian pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara Demokrasi kini menjadi pilihan politik bagi mayoritas negara di dunia, hal ini karena demokrasi dianggap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya.

Demokrasi pun disebut-sebut dapat mengakomodir segala kebutuhan politik rakyat terhadap negara, yakni partisipasi politik yang terdistribusi baik lewat lembaga-lembaga parlementer maupun extraparlenter. Selain itu, makna dari pada demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dalam hal ini terjelaskan bahwasannya suatu negara memberi hak kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan. Rakyat sebagai penerima kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut dan ambil bagian dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat negara. Secara implisit, setiap warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara, lalu yang kedua adalah mereka atau warga negara yakni yang menjadi sasaran dari pada fungsi dan tujuan dari golongan yang pertama tersebut.

Pemilihan Umum yang disebutkan sebagai Pemilu merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun, keberhasilan dari pada pemilihan umum adalah untuk mencapai asas demokrasi di Indonesia dengan melahirkan pemimpin yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pemilihan umum sendiri mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai :

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Pemilihan umum di daerah merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat baik itu eksekutif ataupun legislatif mulai dari gubernur, bupati dan walikota. Pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pesawaran merupakan hajat yang sangat penting dalam membentuk dan meregenerasi kepemimpinan mulai dari kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku eksekutif di daerah serta anggota DPRD sebagai legislatif di Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan secara baik untuk kemajuan rakyat dan daerah.

Pemilukada di Lampung Selatan memilih Bupati dan Wakil Bupati sedangkan pemilu legislatif memilih anggota DPRD beserta pimpinan di DPRD.

4.1.2 Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Pesawaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Kabupaten Pesawaran yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang mendampingi kerja dari lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran pasal 23 DPRD Mempunyai Tugas Dan Wewenang yaitu membentuk peraturan daerah bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati tersebut berhalangan atau adanya kekosongan jabatan; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa hak. Diantara hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi pemahaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Selain memiliki hak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) juga memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang kode etik pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara.
4. Mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan.
5. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Menaati tata tertib dan kode etik.
8. Menyerap dan menghimpun aspirasi melalui kunjungan kerja secara berkala
9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat..

Hasil Pemilu tahun 2019, tanggal 17 April 2019. Dengan anggota sebanyak 45 orang, telah diambil sumpah dan janji pada tanggal 19 Agustus 2019. Telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 - 2024. Berikut daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 -2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019 - 2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Tanggal di Lantik
1	Suprpto	Ketua DPRD	PDIP	3 Februari 2021
2	Paisaludin	Wakil Ketua I DPRD	PAN	7 Oktober 2019
3	Musannif Yasser Syamsurya	Wakil Ketua II DPRD	DEMOKRAT	7 Oktober 2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Tanggal di Lantik
4	Zulkarnain	Wakil Ketua III DPRD	PKB	7 Oktober 2019

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022)

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang terpilih pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 adalah 45 Orang, berasal dari 11 partai politik. Berikut nama partai politik dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam Periode :

Tabel 4.2 Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran

Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode	
	2014 – 2019	2019 – 2024
PKB	4	5
Gerindra	4	4
PDIP	8	9
Golkar	5	4
Nasdem	4	4
PKS	4	4
PPP	3	2
Hanura	2	2
Demokrat	2	5
PBB	2	1
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	11	11

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022)

Pada Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 sendiri, Kabupaten Pesawaran terbagi dalam 5 daerah pilihan (Dapil) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Daerah Pemilihan tersebut adalah :

Tabel 4.3 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Pesawaran 1	Gedong Tataan	9
Pesawaran 2	Negeri Katon, Tegineneng	11
Pesawaran 3	Way Ratai, Padang Cermin, Teluk Pandan	10
Pesawaran 4	Marga Punduh, Punduh Pidada	3

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Pesawaran 5	Way Lima, Kedondong, Way Khilau	12
	Total	45

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022)

Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemilihan calon legislatif (pileg) pada tahun 2019 yang lalu. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memilih calon anggota yang akan mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga legislatif di daerah. Hasil dari pemilihan legislatif tersebut meloloskan sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat duduk di kursi legislatif di Kabupaten Pesawaran. Berikut nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2019-2024

Tabel 4.4 Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2024

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Devita Sahara	PKB	Pesawaran 1	1.880
Zulkarnain	PKB	Pesawaran 2	1.470
Firdayana	PKB	Pesawaran 3	1.110
Rudi Andriansyah	PKB	Pesawaran 5	1.700
Rohimah Rahman, S.Ag.	PKB	Pesawaran 5	1.677
Evi Susina, S.H.	Gerindra	Pesawaran 1	1.542
Lenida Putri, S.IP.	Gerindra	Pesawaran 2	2.142
Rudi Agus Sunandar, SE.	Gerindra	Pesawaran 3	1.211
H. Syaipurrohman, SE.	Gerindra	Pesawaran 5	1.564
Aria Guna, S.Sos.I., M.M.	PDI-P	Pesawaran 1	1.786

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
M. Nasir, S.I.Kom., M.M.	PDI-P	Pesawaran 2	6.196
Sucipto, S.A.P.	PDI-P	Pesawaran 2	2.778
Bambang D.S.L.P., S.H. S.Kep	PDI-P	Pesawaran 2	1.922
Suprpto	PDI-P	Pesawaran 3	2.440
Evi Dwiyana Lestari	PDI-P	Pesawaran 3	1.521
Masnayati	PDI-P	Pesawaran 4	1.787
Heri Yurizal Efendi	PDI-P	Pesawaran 5	1.612
Harno Irawan	PDI-P	Pesawaran 5	1.593
Drs. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I.	Golkar	Pesawaran 1	1.177
Yusak, SH., MH.	Golkar	Pesawaran 2	2.894
Bambang Suheri, SH.	Golkar	Pesawaran 3	2.278
Mustika Bahrum, SE., M.M.	Golkar	Pesawaran 5	2.277
Hamsinar	Nasdem	Pesawaran 1	1.549
A. Gunawan	Nasdem	Pesawaran 3	1.364
Fahmi Fahlevi, S.Pd.	Nasdem	Pesawaran 4	2.270
Roliyansyah, SE.	Nasdem	Pesawaran 5	894
Atut Widiarti, S.Sos.	PKS	Pesawaran 1	1.221
Tati, SE.	PKS	Pesawaran 2	2.250
Widada	PKS	Pesawaran 3	1.881
Agung Prasetia Baktiana	PKS	Pesawaran 5	2.187
Andi Supratman	PPP	Pesawaran 2	1.904
Rifky Assofani, SH.	PPP	Pesawaran 5	1.372
Muklis	PAN	Pesawaran 1	2.417

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Paisaludin	PAN	Pesawaran 2	4.666
Umroni, A.Md.	PAN	Pesawaran 3	898
Saifudin	PAN	Pesawaran 4	2.336
Saptoni, SH.	PAN	Pesawaran 5	2.841
Supriyadi	Hanura	Pesawaran 1	1.884
Rohman	Hanura	Pesawaran 5	1.037
Bumairo	Demokrat	Pesawaran 1	1.394
Olan Fitriyono	Demokrat	Pesawaran 2	5.179
Irfani, SP.	Demokrat	Pesawaran 2	2.398
Musannif Yasser Syamsurya	Demokrat	Pesawaran 3	1.646
Subhan Wijaya, S.Kom.	Demokrat	Pesawaran 5	1.795
Muzakkar, S.Sos	PBB	Pesawaran 3	1.998

(Sumber: Sekeretariat DPRD Kabupaten Pesawaran)

4.1.2.1 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran merupakan bagian penting dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang dibentuk untuk membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Alat Kelengkapan Dewan diantaranya adalah:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi

- d. Bapemperda
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

4.1.3 Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dibantu oleh Pembantu Pimpinan, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 pasal 179 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

Pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran menyebutkan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD Kabupaten
- b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 3. Sub Bagian Perpustakaan.

- d. Bagian Keuangan Membawahi
1. Sub Bagian Anggaran.
 2. Sub Bagian Pembendaharaan
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sedangkan sub bagian- sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bersangkutan

Tabel 4.5 Daftar Jumlah Fraksi

I. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)

No	Nama	Jabatan
1.	Ns. Fx Bambang Dslp, S.H., S.Kep.	Ketua
2.	Evi Dwiana Listiani	Sekretaris
3.	Harno Irawan	Bendahara
4.	Suprpto	Anggota
5.	Aria Guna, S. Sos., M.M.	Anggota
6.	Heri Yurizal Efendi, S.Sos.	Anggota
7.	Masnayati, SE.	Anggota
8.	Pujadi, S.Pd., M.M.	Anggota
9.	Rani Yunita, S.Pd.	Anggota

II. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

No	Nama	Jabatan
1.	Saifudin, S.H.	Ketua
2.	Saptoni, S.H.	Sekretaris
3.	Paisaludin, S.H.	Anggota
4.	Umroni, A.Md.	Anggota
5.	Muklis	Anggota

III. Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar)

No	Nama	Jabatan
1.	Bambang Suheri, S.H.	Ketua
2.	Dra. Hj. Erlinda Widiastuti	Sekretaris
3.	Yusak, S.H., M.H.	Anggota
4.	Mustika Bahrum, S.E., M.M.	Anggota

IV. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

No	Nama	Jabatan
1.	Evi Susina, S.H.	Ketua
2.	Lenida Putri, S.IP.	Sekretaris
3.	H. Saipurrohman, S.E.	Bendahara
4.	Hi. Rudi Agus Sunandar, S.E.	Anggota

V. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Tati, S.E.	Ketua
2.	Atut Widiarti	Wakil Ketua
3.	Widada	Sekretaris
4.	Agung Prasetya Baktiana, S.E.	Anggota

VI . Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)

No	Nama	Jabatan
1.	Roliyansyah, S.E.	Ketua
2.	A. Gunawan	Sekretaris
3.	Fahmi Fahlevi, S.Pd.	Anggota
4.	Hamsinar	Anggota
5.	Muzakkar, S.Sos.	Anggota
6.	Supriyadi	Anggota
7.	Rohman	Anggota

VII. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

No	Nama	Jabatan
1.	Firdayana, S.Kom	Ketua
2.	Rohimah Rahman, S.Ag.	Sekretaris
3.	Devita Sahara, S.Kom	Anggota
4.	Rudi Adriyansyah	Anggota
5.	Zulkarnain	Anggota
6.	Andi Supratman	Anggota
7.	Rifki Assofani, S.H., M.H.	Anggota

VIII. Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat)

No	Nama	Jabatan
1.	Subhan Wijaya, S.Kom.	Ketua
2.	Irfani, S.P.	Sekretaris
3.	Yasser S. Ryacudu, S.E., M.M.	Bendahara
4.	Bumairo	Anggota
5.	Olan Fitrionando	Anggota

4.1.5 Gambaran Kehidupan Sosial di Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Pesawaran secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Saibatin, penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Pesawaran terdiri dari bermacam - macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.

Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan. Dengan beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya.

Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering terlihat adalah pada acara - acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Pesawaran dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Pesawaran dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Saibatin yang merupakan mayoritas suku Lamꞑ kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam kontestasi politik modal sosial sangat berpengaruh penting untuk setiap kandidat yang akan bersaing di dalamnya, modal sosial ini adalah modal dasar atau kekuatan yang harus dimiliki setiap kandidat yang ingin maju dalam ajang pemilihan legislatif ataupun eksekutif, Modal sosial merupakan suatu bentuk kepemilikan modal awal atau pemanfaatan sumber daya yang dapat mengakses kesegala ruang untuk mendapatkan kekuasaan yang harus dimiliki oleh setiap kandidat dalam kontestasi politik. selain untuk mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat untuk memilih namun modal sosial juga sangat berpengaruh untuk memaksimalkan kualitas wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen kedepannya.

Pada ajang pemilihan memang tidak semua kandidat yang memiliki kekuatan modal sosial dapat dipastikan akan berhasil memenangkan ajang pemilihan namun berdasarkan kekuatan modal sosial yang mereka miliki setiap kandidat dapat membuka, menambahkan bahkan menentukan peluang kemenangan setiap kandidat didalam ajang pemilihan, hasil temuan-temuan peneliti dilapangan menjelaskan bahwasannya kemenangan setiap kandidat pada ajang politik sulit untuk dicapai tanpa adanya kekuatan modal sosial.

1. Pada indikator kepercayaan diperlukan interaksi dan pola komunikasi yang dibangun secara baik dan maksimal dengan masyarakat. Interaksi tersebut terwujud dalam banyak kegiatan, misalnya pada saat bakti sosial, pesta pernikahan, kematian/kedukaan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya kemudian kapasitas yang dimiliki setiap kandidat menjadi penilaian bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan sehingga masyarakat tidak ragu untuk memberikan kepercayaan untuk memilihnya pada pemilu.

2. Pada indikator jaringan setiap kandidat harus memiliki jaringan, karena jaringan memiliki peran yang sangat signifikan dalam kontestasi pemilihan selain itu jaringan juga akan membentuk dukungan masyarakat dari hasil kerja jaringan yang dimiliki oleh setiap kandidat, mulai dari jaringan sentimen seperti kekeluargaan, pertemanan dan kekerabatan ataupun jaringan kepentingan mulai dari jaringan organisasi, paguyuban atau kelompok SARA, dengan adanya kepemilikan jaringan oleh setiap kandidat akan membentuk kekuatan setiap kandidat dalam memperbesar peluang kemenangan ataupun mencapai kemenangan.
3. Pada indikator Norma, setiap kandidat yang mengikuti kontestasi harus menjadi seseorang yang taat aturan sosial yang berlaku ditengah masyarakat sebagai kontrol diri yang dapat membentuk karakter setiap kandidat untuk menjadi individu yang ditauladani di masyarakat dan dapat lebih difavoritkan oleh masyarakat, sebagai wujud individu yang pantas untuk dijadikan wakil masyarakat di parlemen. Hal tersebutlah yang juga tercermin pada Anggota DPRD Terpilih Tiga Periode Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Kekuatan Modal Sosial dari pada anggota DPRD terpilih pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pesawaran sangat mendominasi dari pada kekuatan modalitas masing-masing kandidat yang berhasil duduk di kursi DPRD hasil Pemilu Legislatif 2019, peneliti menyimpulkan bahwasannya setidaknya ada tiga bentuk modal sosial yang sangat berpengaruh yang dimiliki Anggota DPRD terpilih tiga periode Kabupaten Pesawaran dalam keberhasilan setiap kandidat memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 yaitu : Kepercayaan, jaringan dan norma.
4. Secara umum kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Maka setiap kandidat pelaku modal sosial berhasil melakukan ketiga indikator tersebut yaitu Kepercayaan, Jaringan dan Norma. Ketiga modal sosial ini dapat menjadi suatu cara bagi politisi dan masyarakat juga sebagai acuan mereka untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi politik terutama dalam pemilu legislatif. Dengan berlakunya praktik modal sosial ini, maka politisi memperkecil biaya

pemilu yang akan mereka hadapi dan bagi masyarakat juga hal ini menjadi daya penguat untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam kontestasi politik terhadap praktik politik uang. Sehingga masyarakat dapat benar - benar memilih wakil rakyatnya dengan baik dan benar menurut penilaian mereka masing - masing

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Pada indikator Kepercayaan peneliti menyarankan sebaiknya anggota DPRD terpilih tiga periode agar tetap dapat menjaga amanah, tanggungjawab, pola komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat.
2. Selanjutnya pada indikator Jaringan sebaiknya para anggota DPRD terpilih tiga periode lebih memperluas lagi jaringannya agar menambah peluang untuk kembali terpilih pada kontestasi berikutnya, bahkan sampai level yang lebih tinggi.
3. Sedangkan pada indikator Norma sebaiknya Anggota DPRD terpilih tiga periode dapat tetap konsisten menunjukkan sikap, sifat, tingkah laku yang taat pada norma sosial juga menjadi pribadi yang ditauladani oleh masyarakat.

Secara umum saran untuk kandidat politik, politisi yang akan berkontestasi, partai politik dan masyarakat agar sampai seterusnya pada saat berlangsung pesta demokrasi yaitu pemilu legislatif. Praktik Modal sosial tetap dilakukan dengan dalih hal ini menjaga kestabilan pemilu, agar tidak terjadi pemicu perpecah belahan antara sesama politisi dan masyarakat. Justru modal sosial bisa menjadi pemersatu pemikiran untuk sama - sama menjaga sportivitas saat berkontestasi politik. Hal ini juga dapat dijadikan acuan untuk mengurangi terjadinya politik praktis, yang mana dalam hal ini praktik politik uang dapat berkurang bahkan hilang dalam setiap berlangsungnya pemilu legislatif.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



**PANDUAN WAWANCARA
DPRD Kabupaten Pesawaran**

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN)**

I. Identitas Narasumber

- Nama : Devita Sahara
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Informan : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah Dapil?

Jawaban : Sama juga halnya pada saat tahapan berkampanye apa yang dapat kita lakukan maupun berikan itu akan menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat bahwa kita memang benar - benar menjadi wakil dan perwujudan dari keinginan, aspirasi juga kebutuhan masyarakat

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang ada dilingkup masyarakat maupun pemuda?

Jawaban : Saya aktif di beberapa organisasi sebagai Srikandi pemuda pancasila, pernah juga menjadi ketua perempuan bangsa, menjadi pengurus partai politik, dari situlah jaringan terbentuk.

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?

Jawaban : Melakukan pendekatan kepada Masyarakat sehari - hari dengan bersilaturahmi, selanjutnya pendekatan melalui kegiatan seperti pengajian, arisan RT/RW, pertandingan yang dilaksanakan di setiap desa. Dalam pendekatan itu juga masyarakat banyak menginginkan bantuan melalui kegiatan ataupun terkait keperluan seperti pendidikan, kesehatan. Maka saya sebagai anggota dewan tentunya kita sudah seharusnya sangat peduli terhadap masyarakat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?

Jawaban : Pola dan cara kita berbicara, menyapa dan bertingkah laku yang baik terhadap keluarga ataupun masyarakat tentu harus memperhatikan kesopanan dan attitude. Terlebih lagi ketika masyarakat ada musibah maupun hajatan saya harus hadir, dalam bentuk kepedulian inilah menunjukkan sifat sikap juga perilaku baik kita dengan masyarakat.

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?

Jawaban : Melalui partai saya menggerakkan roda kepengurusan yang berjumlah 19 ranting, itu termasuk motor saya untuk memperbanyak jaringan dan bergerak sampai ke masyarakat, dengan membentuk kepedulian. Terlebih lagi melalui ketua ranting perdesa agar dari situlah berguna untuk makin mendekatkan diri kepada masyarakat.

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran?

Jawaban : Tidak ada strategi tertentu yang saya pakai, hanya saja ketika dalam lingkup masyarakat terdapat kegiatan maka saya hadir dan memberikan bantuan sumbangsih untuk memperlancar kegiatan tersebut, selain itu saya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat di wilayah dapil saya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



**PANDUAN WAWANCARA
DPRD Kabupaten Pesawaran**

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN)**

II. Identitas Narasumber

- Nama : Yusak SH.,MH.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Informan : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran
- :

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah Dapil?

Jawaban Pada saat berkampanye, kan memang ketika itu kita sudah menjadi anggota dewan, maka saya mengambil keputusan untuk jangan pernah berubah perilaku, sikap kepada masyarakat. Selain itu juga ketika masyarakat meminta bantuan apapun bentuknya, semampunya kita bantu. Baik terkait kebijakan pemerintah ataupun permasalahan di masyarakat. Kita sebagai anggota dewan menghubungkan kepada pemerintah sebagai aspirasi dari masyarakat, selalu serius untuk membantu bagaimana hasilnya nanti itu sudah menjadi usaha untuk membuat masyarakat semakin percaya.

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang ada dilingkup masyarakat maupun pemuda?

Jawaban : Kalau saya ikut secara langsung dalam organisasi tidak terlalu tetapi saya selalu dilibatkan, baik itu menjadi pembina maupun penasihat.

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?

Jawaban : Awal mulanya saya memang bukan orang politik, saya pengusaha suplayer sugar group dan gunung madu. Saat itu karena oleh masyarakat juga saya dianggap sebagai tokoh di desa saya, mereka



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



mempercayai saya untuk mencalonkan diri, juga pada saat itu saya berkeyakinan ketika masyarakat sudah mempercayai saya, saya akan terpilih. Saya juga berkeyakinan melalui pendekatan suplayer tadi, masyarakat sudah percaya saya bisa menjaga amanah, saat belum menjadi anggota dewanpun saya sudah berkomunikasi dengan kerabat, sanak saudara diberbagai desa di wilayah dapil saya.

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?

Jawaban : Saya sih memang ketika ada hajatan, turnamen ataupun kabar duka saya hadir, ketika tidak ada kesibukan di kantor atau partai saya maen berkeliling. Dimanapun ketika ada masyarakat yang suka kumpul - kumpul saya dateng, bersepeda mengelilingi wilayah dapil. Pendekatan ini tidak pilih - pilih, jangan berfikir ketika kita dekat kita berfikir mereka akan memilih, jangan seperti itu. Dekat dengan semua lapisan masyarakat sehingga disitu sifat sikap perilaku kita dilingkup masyarakat menjadi baik, hangat juga harmonis. Selalu continue untuk tujuan dan niat selalu baik kepada masyarakat, terbuka akrab. Jangan buat masyarakat takut dengan kita, berkecimpung dimanapun tempatnya. Kita dianggap terbuka jangan angkuh, sombong. Dan kita gabisa memastikan masyarakat memilih kita ketika kita menunjukkan sikap baik, harus selalu berperilaku baik dan dekat dengan mereka, praduga baik aja. Ketika sikap masyarakat baik dengan kita itu sudah luar biasa bagi saya, berartikan disitu tidak ada suatu hal yang ditutupi. Di dapil saya ini 37 desa memang tidak mungkin utuk lebih dekat dengan semuanya, tetapi dari tahapan itu tadi lah, dimanapun kita datang kita tunjukan sikap baik, itu juga merupakan usaha untuk membesarkan dan menjaga nama baik partai. Harus selalu berbuat baik dengan maksimal semampu kita berperilaku lebih dekat dengan masyarakat, jangan tunjukan suatu hal yang membuat masyarakat muak dan segan dengan kita.

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?

Jawaban : kalau ada kegiatan pengajian, turnamen pemuda, terlepas mereka memilih saya ataupun tidak itu urusan nanti. Yang terpenting saya dekat dengan masyarakat dan mereka mengenal saya, itu merupakan selangkah kita untuk berjuang dalam pemilu legislatif. Jangan sampai masyarakat ketika sudah mendekati pemilihan tidak mengenal kita, kalau sudah kenal kedepan saya akan lebih dekat dengan masyarakat. Dan sudah ada sedikit jaringan, suara saya di setiap desa sudah ada, melalui pendekatan itu tadi terbentuk jaringan yang utuh, mereka sudah tau jiwa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



kepemimpinan kita, jadi pada saat berkampanye sudah tidak terlalu khawatir. Karena kita sudah pendekatan emosional dengan masyarakat tidak membutuhkan biaya. Dari sudah saling kenal dan sering membantu.

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran?

Jawaban : Dengan memperbanyak kegiatan dan pendekatan terhadap masyarakat itulah menjadi strategi bagi saya untuk mengambil hati agar masyarakat akan selalu ingat dan memilih saya sebagai wakil rakyatnya di daerah pemilihan 2 kabupaten pesawaran.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



**PANDUAN WAWANCARA
DPRD Kabupaten Pesawaran**

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN)**

III. Identitas Narasumber

- Nama : Tati, SE.
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Informan : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran

:

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah Dapil?

Jawaban : Ketika ada berbagai kegiatan, pertemuan serta undangan saya mengahdirinya terlebih ketika ada perayaan hari besar atau nasional ada ditengah masyarakat, kemudian dari langkah itulah masyarakat akan percaya dan juga kita harus menjaga kepercayaan mereka untuk menjadi dewan yang menyalurkan aspirasi - aspirasi masyarakat. Sehingga semua tujuan dapat selaras itu semua pasti perlahan terwujud.

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang ada dilingkup masyarakat maupun pemuda?

Jawaban : Saya di desa sebagai ketua kelompok pengajian, di partai politik saya sebagai pengurus partai, untuk lingkup pemuda saya bukan pengurus namun tiap ada turnamen selalu diundang dan saya hadir ikut serta memeriahkannya.

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?

Jawaban : Berbuat baik dengan masyarakat sekitar dan jangan pernah berdusta apalagi memberi janji – janji muluk yang tidak pernah bisa diwujudkan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?

Jawaban : Saya menyesuaikan perilaku dengan perilaku yang ada disekitar masyarakat, mencoba untuk selalu berbuat baik ketika ada masalah pribadi jangan sampai terbawa - bawa ketika kita bertemu masyarakat. Selalu tunjukkan sikap sifat yang baik tanpa adanya kepalsuan sedikitpun. Jadi masyarakat menganggap bahwa kita juga bagian dari mereka, disitulah tidak adanya kecanggungan. Selain itu juga kita harus menjaga komunikasi dengan masyarakat, sehingga ketika ada pemilihan untuk periode selanjutnya masyarakat yang meminta bantuan kita bantu dengan maksimal dan kita tidak perlu mencari masyarakat untuk memilih, karena sudah terjaga itu tadi jadi itu suatu timbal balik untuk tujuan selanjutnya.

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?

Jawaban : melalui partai politik saya sering memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya masyarakat terlibat langsung dalam politik dengan langkah seperti itu masyarakat semakin mengenal, lambat laun jaringan itu akan semakin kuat. Sehingga masyarakat akan memilih calon yang asal usulnya sudah diketahui bahkan kenal. Disitu masyarakat beranggapan mereka tidak salah dalam memilih pemimpin yang mewakili mereka di legislatif.

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran?

Jawaban : Menjaga dan merawat kepercayaan, jaringan dengan masyarakat itu sudah selalu saya pertahankan untuk tetap mencari dukungan terhadap saya pribadi, sehingga pada saat setiap pemilu legislatif masyarakat akan mendukung saya secara terus menerus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



**PANDUAN WAWANCARA
DPRD Kabupaten Pesawaran**

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN)**

I. Identitas Narasumber

- Nama : Suprpto
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Informan : Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah Dapil?

Jawaban Sama halnya pada saat saya berkampanye, disetiap tempat kan berbeda - beda karakter masyarakatnya, kita harus pinter membaca situasi dan simpatik masyarakat yang kita datangi, baik kelompok pengusaha, pertanian. Tidak hanya itu, kita juga harus nmenjaga keharmonisan keluarga besar, dari kepercayaan keluarga besar itu menjadi modal awal kita membangun kepercayaan dengan masyarakat lainnya. Karena kalau dari keluarga saja misalnya tidak rukun, terpecah. Bagaimana masyarakat akan percaya dengan tujuan mulia kita sebagai anggota dewan.

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang ada dilingkup masyarakat maupun pemuda?

Jawaban : Karena memang faktor usia juga jadi saya mengikuti organisasi itu sebagian besar hanya menjadi penasehat. Saat itu saya selalu ikut, diberbagai organisasi baik lingkup masyarakat maupun pemuda. Salah satunya menjadi pengurus karang taruna, dan andil dalam kelembagaan desa. Tidak hanya itu jaringan yang saya bangun juga melalui partai politik, dengan selalu mensosialisasikan pancasila.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?

Jawaban : Saya mantan kepala desa di salah satu desa wilayah dapil saya. Setelah mengabdikan diri sebagai kepala desa, saya memang sudah mendapat kepercayaan, bahkan masyarakat juga mempercayai saya untuk maju sebagai dewan, dengan berbagai pendekatan di desa saya maupun desa lainnya. Alhamdulillah saya menampung berbagai macam aspirasi dan kemauan masyarakat tentunya baik dari masyarakat umum, pemuda semua lapisan. Berbagai macam cara melalui momen mensejahterakan dan membangun desa, dibidang pembangunan juga olahraga. Membantu untuk meringankan keluhan masyarakat, saya tuntaskan semua, disitulah selalu terbentuk kepercayaan masyarakat terhadap saya. Terutama dalam bidang pertanian, saya membantu masyarakat untuk membantu permasalahan pertanian, pupuk, sosialisasi pembenahan saya lakukan. Di desa juga saya selalu hadir untuk membantu mengaktifkan pengajian rutin ibu - ibu.

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?

Jawaban : Kalau secara pribadi saya walaupun sampai saat ini dari mulai menjadi kades hingga menjadi anggota dewan, saya menjalankan amanah untuk masyarakat dan patuh terhadap perintah partai. Saya dengan masyarakat itu tidak ada perbedaan, sudah terbiasa menunjukkan pola hidup sederhana, tingkah laku dan ucapanpun sederhana. Sehingga masyarakat tidak ada rasa segan, kaku, canggung dengan saya. Sekalipun bertemu di pasar atau dimanapun, masyarakat ketika bertemu dan menghadap saya sudah terbiasa. Dan itu juga tidak mengurangi rasa hormat, itu yang selama ini selalu saya bangun dan tanamkan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, seperti masyarakat biasa pada umumnya. Masyarakat juga tentu mengharapkan timbal balik sikap baik kita, jadi ketika di waktu berkampanye, karena memang kita sudah menunjukkan sikap baik, amanah juga melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui perilaku santun. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita sama - sama usahakan untuk terwujud. Dengan pemuda pun begitu, menunjukkan sikap yang semestinya. Tidak sungkan pemuda menyampaikan aspirasi mereka kepada kita. Dan kita pun akan semangat juga menjalankan aspirasi itu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?

Jawaban : Sebelum pemilihan saya melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi pancasila, dari itu saya selalu menggaungkan kepada berbagai masyarakat di beberapa desa khususnya di wilayah dapil saya untuk mengamalkan pancasila. Karena memang nilai - nilai pancasila menjadi pedoman dan dasar kita untuk melakukan kehidupan baik itu bersosial, budaya. Disitu lengkap dan meyeluruh. Juga kan sebelumnya saya memang jaringan itu sudah ada, pada saat saya menjadi kades, untuk di masyarakat lain saya bangun jaringan melalui tim pemenangan untuk dikenal dan mengenal masyarakat.

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran?

Jawaban : Strategi saya pribadi itu memang dengan modal sosial tadi, bahwa saya harus mempertahankan apa yang sudah saya lakukan terhadap masyarakat. Tidak melupakan tempat kelahiran, terus membangun apa yang bisa saya bangun dan terus memperbaharui apa saja yang sudah berubah dalam lingkup masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



**PANDUAN WAWANCARA
DPRD Kabupaten Pesawaran**

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN)**

I. Identitas Narasumber

- Nama : Mustika Bahrum SE., MM
- Jenis Kelamin : Laki Laki
- Informan : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah Dapil?

Jawaban : Melakukan pendekatan saat kampanye, saya langsung mendatangi kelompok masyarakat. Berkeliling satu rumah kerumah lainnya, dengan pendekatan itulah masyarakat akan menilai kita. Ketika sudah semakin mengenal maka masyarakat akan lebih akrab dengan kita, sampai seterusnya jaga pendekatan itu. Pendekatan emosional, pendekatan masyarakat, ngobrol melakukan diskusi, maka masyarakat akan memilih kita nantinya, karena mereka sudah kenal, dekat dan akrab.

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang ada dilingkup masyarakat maupun pemuda?

Jawaban Berkaitan dengan ketika kita mau mengikut sertakan diri bergabung dalam satu lingkup organisasi masyarakat di desa, baik karang taruna, risma, pengajian. Itu bibit untuk kita menciptakan jaringan dan ketika kita cakap dalam sesuatu, dilayak oleh orang lain pantas, tentu masyarakat mempercayai kita untuk memimpin organisasi itu. Punya jiwa dan kepiawaain dalam memimpin. Apalagi jika punya darah pemimpin, maka sudah terlatih dalam kelurganya. Belajar dalam masyarakat, aktif di masyarakat. Otomatis jaringan itu terbentuk, saya pribadi di desa memang memiliki keturunan kesebatinan di Marga way lima, saya memiliki gelar Suntan Pengayom makhga. Dalam adat saibatn gelar diberikan hanya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



kepada keturunan Raja lampung, artinya tidak bisa dibeli ataupun diminta. Dengan adanya gelar ini, tentu dalam pelaksanaan adat di Pesawaran sudah

semestinya saya aktif dan di hargai sebagai pemipin adat saibatin, yang lingkupnya buka hanya masyarakat namun juga muli mekhanai yang tergabung dalam adat istiadat. Tidak hanya itu saya pernah menjadi Ketua persatuan pemuda pelajar mahasiswa pesawaran, tanggamus, pringsewu. Ini banyak manfaatnya sebagai jaringan yang kuat, untuk menghimpun organisasi.

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?

Jawaban : Kepercayaan itu tidak perlu dibangun, tetapi dengan sendirinya terbangun ketika memang kita mengikuti hubungan sosial di masyarakat. Tidak ada yang direncanakan, natural, mengalir dengan sendirinya, bahwa kita hidup di masyarakat maka kita harus bergaul dengan masyarakat. Memang harus begitu semestinya, kita harus aktif di masyarakat, bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Tidak perlu terlalu luas dulu, dalam keluarga ketika kita sudah dipercaya maka otomatis akan terlihat diluar, orang lain menilai bahwa kita dapat dipercaya dan cikal bakal menjadi seorang pemimpin. Karean dilihat bisa memimpin keluarganya, maka pantas bila menjadi pemimpin untuk masyarakat. Jadi membangun kepercayaan itu bukan rencana, tapi memang seyogya nya setiap manusia harus bertanggungjawab dengan dirinya, keluarga dan lingkungannya.

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?

Jawaban : Dalam bergaul di masyarakat kita harus santun, jangan menutup diri, ketika bergaul, jangan membatasi diri, tidak boleh pilih - pilih baik yang muda, tua ataupun seumuran. Namun juga harus pandai menempatkan diri, utamakan setiap bergaul tujuan kita untuk belajar dalam hal apapun, jangan merasa kita lebih pintar. Dalam istilah lampung itu sepuluh pandai, sebelah ngulih ulih, artinya walaupun kita sudah tau tentang apapun, tapi tetap saja kita saling bertanya, sharing agar tidak terlalu merasa pintar dan tau segala hal. Membuka diri untuk diberikan saran, masukan dan wawasan. Rendah diri dalam bergaul, utamakan etitude, sopan dan santun.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?

Jawaban : Saya juga sejak dari muda sudah aktif di partai, karena saya sering berbaur maka saya didorong dan dipercaya untuk maju sebagai anggota

dewan di wilayah dapil 5 Pesawaran. Sejak awal periode sampai saat ini, saya menjaga jaringan itu baik dengan tim partai, pemuda, juga masyarakat.

Semakin kuat jaringan itu dijaga, maka akan terus berlanjut sampai seterusnya.

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran?

Jawaban : Strateginya apa yang kita niatkan, ucapkan maka harus kita laksanakan, konsisten dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Sebelum menjadi dewan dan sesudah menjadi dewan kita jangan pernah berubah, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka dengan begitu kepercayaan masyarakat akan terus timbul, semakin percaya dan yakin bahwa kita benar - benar bisa menjadi wakil dan pemimpin mereka. Menjadi pemimpin yang bisa menjaga amanah dari masyarakat, seperti itu yang selalu saya lakukan dan jaga sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana
- Ali, Wakhid Sulisty, 2002. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi S. Tidak Dipublikasikan.
- Urner, J. C., & Reynolds, K. J. (2001). *The social identity perspective in intergroup relations: Theories, themes, and controversies*. In R. Brown & S. L. Gaertner (Eds.), *Blackwell handbook of social psychology* (pp. 133-152). Blackwell: Intergroup Processes.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. In-Trans Publishing. Malang
- Field, Jhon, 2011. *Modal Sosial*, Kreasi Wacana: Bantul
- Lestari, A. & Sugeng. 2019. *Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan Sosial, dan Variasi Gaya Mengajar Guru terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMAN 3 dan SMAN 5 Samarinda*. Jurnal PRIMATIKA. Vol. 8, No. 1. Hlm. 2. Diakses pada 13 Oktober 2020
- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, Vol 8 No 1.
- Rusydi Syahra, *Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi* , Jurnal Masyarakat dan Budaya: Vol. 5 No. 1 (2003)
- Haridison, Anyualatha. 2018. "Modal Sosial Dalam Pembangunan". Palang Karaya: JISPAR Vol.4 31-40
- Putri Kurniasari. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan*.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Seti.

- Itok Dwi Kurniawan. 2018. *Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial*. Integralistik, No.1/Th.XXIX/2018.
- Robert D. Putnam. 1995. *Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital In America*. American Political Science Association, Vol 28 (4).
- SUPRIYANTO, *Modal Sosial Dan Kapital Dalam Pemilu Legislatif*. Tahun 2014. (Studi Calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah. Pemilihan Kota Tanjungpinang).
- Pantouw, Stella Maria Ignasia. 2012. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Maximiliaan Lomban pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana, UNDIP.
- Safitri, Cici. 2019. *Pengaruh Modal Sosial Dalam Kemenangan Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa Pada Pilkada 2018*. Skripsi, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang.
- Fathy, Rusydan. 2019. *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol. 6. No 1. Haridison, Anyualatha. 2013.
- Putri, Indah Adi. 2017. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014*. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya. Vol. 19(2). Hal. 167-178.
- Damsar (2011) *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Daud M. Liando, 2016. Jurnal Wacana Politik, Vol 4 No 1. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa)*. Tahun 2016.
- Fathy, Rusydan. 2019. *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan*
- Halliweel, John F. (2001) “*Social Capital and Prosocial Behaviour Sources of Well-Being*”
- Hanafi, R. I. (2018). *Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019*. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 197-213.
- Haridison, Anyualatha. 2013. *Modal Sosial Dalam Pembangunan*. Jispar, FISIP
- <http://www.pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses pada hari senin, 11 September 2021 pukul 12.30 WIB
- Indah Adi Putri. 2017. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014*. Jurnal Antropologi, Vol 19 No 2.
- Itok Dwi Kurniawan. 2018. *Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial*. Integralistik, No.1/Th.XXIX/2018.

- Jamal PN, 2015. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014*. Jurnal Antropologi, Vol 19 No 2.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 3
- Jurnal Antropologi: *Isu-isu Sosial Budaya*. Vol. 19(2). Hal. 167-178.
- Krisdinanto, N. (2016). *Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 189-206.
- Maharani, R., Rahmatunnisa, M., & Agustino, L, 2020. Modalitas RA. *Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi*
- Jurnal Perspektif, 3(2), 295-301. *Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 6. No 1.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya, Jakarta. Burhan Mungin.
- Muradi, M., & Agustino, L. (2020). *Strategi Pemenangan Martin Billa Melalui Pemanfaatan Modal Sosial Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 (Studi: Kabupaten Malinau)*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(3), 444-457.
- Ni'matul Huda. Ilmu Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hal. 24 Novianti, C. E. (2016). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333-354.